

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan adalah program pemberdayaan kewilayahan yang meliputi kegiatan pemberdayaan lingkup RW, pemberdayaan lingkup PKK, pemberdayaan lingkup Karang Taruna dan pemberdayaan lingkup LPM (Peraturan Wali Kota Bandung No 015 Tahun 2019 Pedoman Teknis Pelaksanaan PIPPK, 2019: 6).

Tujuan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) adalah meningkatkan tugas, peran dan fungsi aparat kewilayahan beserta seluruh stakeholder lembaga kemasyarakatan kelurahan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mewujudkan sinergitas kinerja aparat (Peraturan Wali Kota Bandung No 015 Tahun 2019 Pedoman Teknis Pelaksanaan PIPPK, 2019: 7).

Program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan (PIPPK) di Kelurahan Pasirbiru dilaksanakan dengan cara melakukan pemeliharaan penghijauan agar tercipta lingkungan yang bersih, tidak banyak polusi, udaranya lebih segar. Hambatan pembangunan saat ini adalah kurangnya pemeliharaan lingkungan, sumber daya manusia dan informasi dalam kegiatan pelaksanaan program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan di Kelurahan Pasirbiru.

Kelurahan Pasirbiru Merupakan salah satu Kelurahan di Kota Bandung yang melaksanakan kebijakan PIPPK. Dalam merealisasikan program PIPPK, Kelurahan Pasirbiru masih mengalami kendala, sehingga program tersebut belum maksimal. Kurangnya kemampuan SDM atau pelaksana kegiatan menjadi salah satu faktor tidak maksimalnya program PIPPK di Kelurahan Pasirbiru.

Oleh karena itu, makna kewilayahan artinya adanya lingkup Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Makna Kewilayahan bermanfaat bagi masyarakat seperti menswadayakan masyarakat, mensosialisasikan masyarakat, mendorong masyarakat secara partisipatif kepada masyarakat dalam mengembangkan kewilayahan dengan mengajak masyarakat agar tidak malas dalam pelaksanaan program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan.

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari kata Latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2) Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga (Koentjaraningrat, 2009: 115-118).

Berdasarkan asal daerahnya, masyarakat Indonesia dibedakan menjadi masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Masyarakat perkotaan yaitu masyarakat yang tinggal atau berasal dari kota. Adapun masyarakat pedesaan yaitu masyarakat yang tinggal atau berasal dari desa. Perbedaan antara kedua masyarakat tersebut tidak berbeda jauh apabila desa yang dimaksud dekat dengan daerah perkotaan. Sedangkan bagi masyarakat yang tinggal di desa jauh dari kota akan mempunyai perbedaan yang jelas di dalam cara hidup dan perilaku sehari-harinya (F, 2019: 23).

Menurut Indriana (2019: 23-24) masyarakat perkotaan lebih cepat dalam menerima teknologi dan informasi, sehingga peradaban yang mereka miliki akan lebih cepat maju daripada masyarakat yang tinggal di desa. Di kota, sarana dan prasarana kehidupan lebih lengkap sehingga memungkinkan untuk mengikuti perkembangan zaman. Masyarakat perkotaan yang cenderung memiliki sifat individual dan heterogen dengan kehidupan yang modern yang dilengkapi dengan berbagai arsitektur dan industri yang canggih (Noor, 2011:90).

Masyarakat perkotaan memiliki tingkat keberagaman sosial yang tinggi, oleh karena itu kontrol sosial di dalam masyarakat perkotaan menggunakan pengawasan yang tidak terlalu ketat sehingga toleransi sosial sangat tinggi. Selain itu, masyarakat perkotaan lebih mengutamakan prestasi sehingga mobilitas sosial relatif tinggi.

Dalam kelompok masyarakat perkotaan cenderung bersifat sukarela dan menganut individualisme karena adanya kebebasan dalam pengambilan keputusan secara individu, oleh karena itu masyarakat perkotaan cenderung memisahkan diri secara fisik berdasarkan perbedaan kelompok sosial. Dengan demikian, dibutuhkan beberapa upaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Salah satunya yaitu dengan program pembangunan dan pemberdayaan.

Pembangunan dan pemberdayaan pada dasarnya merupakan perpaduan dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara dinamis untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan memiliki ruang lingkup yang sangat luas, oleh sebab itu pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab semua komponen masyarakat. Berbagai permasalahan dalam pembangunan akan lebih mudah diselesaikan apabila pemerintah dengan masyarakat bersama-sama menyelesaikannya, tentunya hubungan antara pemerintah dengan masyarakat menjadi salah satu kunci utama dalam pembangunan. Hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat harus berlandaskan aspek demokratis yang proporsional, artinya pembangunan harus melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian oleh semua komponen masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah.

Pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan, bersifat integratif, baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory* (Noor, 2011: 87).

Dalam kerangka ini upaya untuk memberdayakan masyarakat (*empowering*) dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek (Noor, 2011: 87):

1. *Enabling* yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang.
2. *Empowering* yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya.
3. *Protecting* yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.

Pendekatan pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung, demokratis dan pembelajaran sosial.

Tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan harus didukung oleh seluruh komponen masyarakat, karena itu hubungan kemitraan pemerintahan daerah dan masyarakat merupakan kata kunci yang sangat strategis yang menjadi fokus perhatian terutama dalam memecahkan masalah pembangunan. Hal ini, ditekankan pada Pembangunan Kewilayahan berupaya mencapai pembangunan yang seimbang.

Dalam kajian ini pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) dan pembangunan masyarakat (*community development*) dimaksudkan sebagai pemberdayaan masyarakat yang sengaja dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya yang dimiliki sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial secara berkelanjutan.

Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan saat ini sedang gencar-gencarnya dilakukan, akan tetapi hasilnya kurang optimal dan sering adanya hambatan seperti karena kenaikan jumlah penduduk dan luasnya cakupan pelayanan pemerintah dapat menjadi suatu, sehingga dapat mengakibatkan pelayanan dibidang pembangunan menjadi kurang merata. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Kota Bandung khususnya membuat suatu kebijakan yang berupa sebuah program. Program tersebut dinamakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diatas, peneliti merumuskan permasalahan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana perencanaan program pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pasir Biru melalui PIPPK?
2. Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pasir Biru melalui PIPPK?

3. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pasir Biru melalui PIPPK?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang tertera, dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realita mengenai:

1. Perencanaan program pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pasir Biru melalui PIPPK.
2. Proses pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pasir Biru melalui PIPPK.
3. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pasir Biru melalui PIPPK.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan bagi peneliti dan dapat menjadi acuan bagi pengembangan ilmu Pengembangan Masyarakat Islam yaitu yang berkaitan dengan kajian mata kuliah Teori Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat dan mata kuliah kebijakan dan perencanaan pembangunan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat secara langsung ataupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan, seperti yang diuraikan dibawah ini:

a) Bagi Peneliti

Hasil dari Penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai konsep pemberdayaan masyarakat yang diterapkan oleh lembaga kelurahan Pasir Biru serta bagaimana melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat kelurahan Pasir Biru. Lalu, peneliti bisa mengimplementasikan teori-teori yang telah didapatkan atau diperoleh di bangku perkuliahan.

b) Bagi Lembaga Perguruan Tinggi

Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan bisa menambah literatur mengenai pemberdayaan masyarakat melalui program PIPPK. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan bisa menjadi pedoman untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang pemberdayaan masyarakat kelurahan Pasir Biru melalui program yang ada di lembaga Kelurahan Pasir Biru lebih baik.

c) Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan bisa bermanfaat untuk pengetahuan ilmiah dibidang pengembangan masyarakat islam, khususnya konseptual mengenai pemberdayaan masyarakat kelurahan Pasir Biru melalui

program PIPPK dan menyumbangkan pemikiran-pemikiran untuk pengembangan teori dan konsep tertentu mengenai proses pemberdayaan masyarakat.

d) Bagi pihak lain

Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan bisa memberi ilmu pengetahuan dan bisa menjadi bahan acuan, khususnya mengenai kajian-kajian yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pasir Biru melalui program PIPPK.

E. Landasan Pemikiran

1. Hasil Penelitian Sebelumnya

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti telah mengkaji hasil dari beberapa penelitian sebelumnya dan hasilnya hampir serupa dengan yang peneliti teliti. Dengan dikajinya beberapa hasil penelitian yang hasilnya hampir serupa ini diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai topik yang akan diteliti oleh penulis. Beberapa hasil dari penelitian yang hasilnya hampir serupa dengan topik yang peneliti teliti, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh wahyuddin dengan judul “Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Tanah Karaeng Kecamatan mamuju di Gowa“. Penelitian tersebut membahas bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di tanah karaeng dan mengamati faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan hasil bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam

kegiatan pembangunan desa dapat dianalisis dengan keempat bidang yakni dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan hasil dengan menggunakan skala likert, adapun hasil dari tahapan factor yang mempengaruhi partisipasi pembangunan diantaranya adalah factor internal yang meliputi kesadaran, kemauan, pendidikan, mata pencaharian, dan penghasilan. Sedangkan factor eksternal yakni meliputi pemerinath wilayah dan fasilitas yang tersedia.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Gugi Gustedi pada tahun 2018 dalam tesis yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung” Penelitian ini didasarkan pada masalah pokok, yaitu implementasi kebijakan PIPPK yang dinilai masih belum optimal. Hal ini diduga disebabkan oleh belum dijalankannya dimensi-dimensi implementasi kebijakan secara maksimal oleh seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Kelurahan Margasari Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PIPPK sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan petunjuk teknis. Selain itu, faktor pendukungnya adalah adanya pemerataan pembangunan, dukungan anggaran sebesar 100 juta bagi RW, PKK, LPM, dan Karang Taruna, serta adanya penyiapan instrument pedoman teknis. Sedangkan Faktor Penghambat antara lain yaitu adanya perbedaan pola pikir di antara diantara lembaga-lembaga kewilayahan di lingkungan Kelurahan Margasari, masih minimnya penyerapan anggaran, dan kurangnya koordinasi di antara lembaga-lembaga kewilayahan di lingkungan Kelurahan Margasari. Selanjutnya penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan PIPPK di

Kelurahan Margasari sudah berjalan dengan cukup baik, tetapi belum menyentuh seluruh aspek pencapaian keberhasilan.

Ketiga, Penelitian Terdahulu yang dilakukan oleh Desi Andriawan pada tahun 2018 dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Walikota Bandung tentang Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Di Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage Kota Bandung” Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Walikota Bandung pada tahun 2015 dan kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 281 tahun 2015. PIPPK merupakan kebijakan baru dan diharapkan mampu mewujudkan sinergitas kinerja aparatur kewilayahan dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya PIPPK di Kelurahan Cisaranten Kidul ini dinilai belum optimal dan mempunyai beberapa hambatan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Saadah Lutfiah mahasiswa pengembangan masyarakat islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Program (KOTAKU) Kota Tanpa Kumuh. Skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana strategi badan keswadayaan masyarakat mekar sejahtera dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui program Kota Tanpa Kumuh dengan pelaksanaannya menggunakan model perencanaan sosial dan pelaksanaannya menggunakan model pengembangan aksi sosial yang mana hal tersebut bertumpu terhadap tujuan, proses dan hasil melalui

peningkatan kesadaran dan pemberdayaan menggunakan kegiatan pelatihan kelompok masyarakat serta melalui relawan-relawan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ainnur Aprilia dengan judul “Upaya Pendampingan Dalam Membangun Kesadaran Masyarakat Kampung Kumuh di Bulak Lor I Kelurahan Bulak Benteng Kecamatan Kenjeran Surabaya” dengan jurusan Pengembangan Masyarakat Islam di UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian tersebut menjelaskan mengenai upaya pendamping atau fasilitator dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan permasalahan pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup. Dengan tujuan penelitian yakni meningkatkan kebiasaan atau perilaku masyarakat dalam pemeliharaan dan melestarikan lingkungan. Latar belakang dari penelitian ini yakni karena munculnya dampak terhadap lingkungan yang timbul karena ketidakpedulian masyarakat terhadap kebersihan di kampung kumuh. Penelitian ini dalam proses pendampingannya menggunakan riset aksi partisipatoris dimana 9 metode tersebut mendorong masyarakat untuk aktif dalam memecahkan sebuah permasalahan melalui beberapa tahapan analisis agar masyarakat dapat mendeskripsikan permasalahan secara mandiri yang kemudian dapat menentukan solusi bersama-sama.

2. Landasan Teoritis

Dalam melakukan penelitian, secara ilmiah dibutuhkan landasan teori sebagai acuan untuk menyelesaikan suatu masalah menurut beberapa ahli

dibidangnya. Jadi peneliti harus menjabarkan pendapat-pendapat dari berbagai ahli yang terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Suharto (2017: 60) berpendapat bahwa hal penting dari pemberdayaan adalah menguatkan kekuasaan dari masyarakatnya, utamanya kelompok masyarakat yang lemah atau kelompok masyarakat yang tidak mempunyai keberdayaan, baik yang disebabkan oleh keadaan internal (contohnya anggapan mereka pribadi), ataupun disebabkan keadaan eksternal (contohnya ditekan oleh struktur sosial yang tak adil). Untuk lebih memperluas pemahaman tentang pemberdayaan, diperlukan pengetahuan gambaran tentang kelompok masyarakat lemah dan ketidakberdayaan yang dirasakannya. Kelompok masyarakat yang termasuk dalam kategori kelompok masyarakat lemah dan tidak berdaya yaitu:

1. Kelompok masyarakat lemah secara struktural, seperti lemah secara kelas, secara gender, maupun secara etnis.
2. Kelompok masyarakat lemah secara khusus, seperti masyarakat yang sudah lanjut usia, remaja dan anak-anak, disabilitas, lesbian dan gay, dan masyarakat yang terasingkan.
3. Kelompok masyarakat lemah secara personal, yakni masyarakat seperti mempunyai problem sendiri dan/atau masalah keluarga.

Anwas (2014:86) berpendapat bahwa pemberdayaan penanggulangan kemiskinan bisa dilaksanakan dengan mengubah pandangan bahkan pemikiran setiap orang serta masyarakat agar berdaya dan mandiri. Proses pemberdayaan juga dapat dilakukan dengan aktivitas-aktivitas yang bisa menambah

keikutsertaan dari setiap individu ataupun masyarakat. Bentuk dari aktivitas-aktivitas pemberdayaannya yaitu seperti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang mendorong kemampuan serta keterampilan masyarakat yang tepat berdasarkan potensi dan yang dibutuhkan oleh masyarakat, kegiatan-kegiatan pendampingan yang dilaksanakan secara terus menerus, dapat memunculkan berbagai kesempatan kerja, ataupun bentuk aktivitas-aktivitas lainnya.

Dalam model pemberdayaan, pembangunan masyarakat sering dikaitkan dengan konsep partisipasi, mandiri, jaringan kerja serta keadilan. Pada umumnya, pemberdayaan itu ditempatkan dalam kekuatan tingkat personal maupun kelompok sosial. (Hikmat, 2006: 17)

Keberadaan masyarakat Madani di cirikan dengan timbulnya kesadaran bahwa mereka paham akan haknya serta lingkungan hidupnya yang baik dan sehat serta sanggup menjalankan kewajiban dan tanggung jawab untuk tercapainya kualitas lingkungan hidup yang diinginkan. Kemudian berdaya mampu mewujudkan tuntutan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Yaitu proses untuk menuju atau memperoleh daya atau kemampuan. Hakikatnya pemberdayaan masyarakat adalah upaya membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkan masyarakat (Rihlah, 2015: 21).

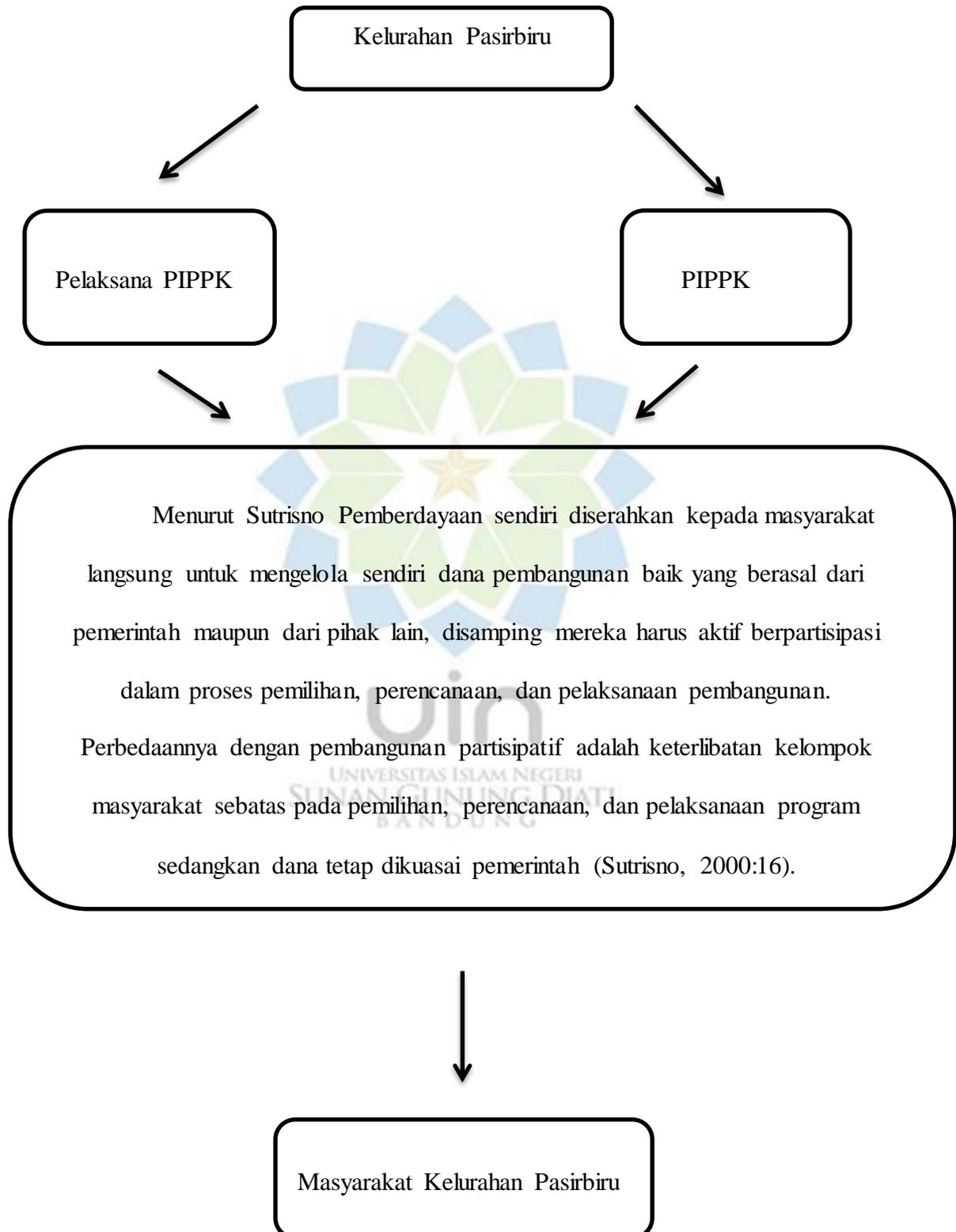
Menurut Sutrisno Pemberdayaan sendiri diserahkan kepada masyarakat langsung untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain, disamping mereka harus aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan. perbedaannya dengan pembangunan partisipatif adalah keterlibatan kelompok masyarakat sebatas pada pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan program sedangkan dana tetap dikuasai pemerintah (Sutrisno, 2000:16).

Sedangkan Ife Dalam buku “*Community Development: creating community alternatives-vision, analisis and practice*” memberikan batasan sebagai upaya penediaan kepada orang-orang atas sumber, kesempatan, pengetahuan dan ketrampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka menentukan masa depannya dan untuk berpartisipasi dalam mempengaruhi kehidupan komunitas mereka (Ife, *Community Development*, 1995: 185).

Sementara Korten berpendapat orientasi *community development* sebagai proses perubahan ditingkat lembaga adalah kenyataan social learning. Proses belajar masyarakat terjadi baik di tingkat perorangan maupun kelompok atau Lembaga. Di indonesia kesadaran tentang pelibatan masyarakat dan keikutsertaan masyarakat dalam usaha penanggulangan kemiskinan (Korten, 2011:50).

PIPPK sendiri dibentuk untuk mewujudkan sinergitas kinerja aparatur kewilayahan dengan lembaga masyarakat kelurahan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

F. Kerangka Konseptual



G. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kelurahan Pasir Biru yang berlokasi di Jl. A.H Nasution No. A47, Pasir Biru, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40615.

Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut, diantaranya:

- 1) Peneliti melihat hal yang menarik, yakni program pemberdayaan kewilayahan yang dilaksanakan melalui PIPPK.
- 2) Peneliti beranggapan bahwa melakukan penelitian di lokasi tersebut cocok dengan kapasitas akademis yang ada di jurusan Pengembangan Masyarakat Islam yaitu dengan mengetahui tahapan pemberdayaan yang ada di kelurahan Pasir Biru.

2. Paradima dan Pendekatan

Paradigma yang dipakai oleh peneliti yakni menggunakan paradigma penelitian kualitatif. Paradigma ini memandang bahwa kenyataan sosial adalah suatu hal yang utuh, kompleks, dinamis, serta banyak makna. Paradigma ini dinamakan dengan paradigma postpositivisme. Karena, dalam melihat tanda-tanda lebih bersifat unggul, statis, dan konkret (Kuswana, 2011: 22).

Dalam penelitian kualitatif, penggabungan datanya disertai dengan fakta-fakta yang didapatkan oleh peneliti pada saat pelaksanaan penelitian, dan tidak dipandu oleh teori. Dengan demikian penelitian ini memakai pendekatan empiris

kualitatif, yakni pendekatan yang didalamnya terdapat beberapa jenis metode penelitian, salah satunya metode deskriptif. (Sadiah, 2015: 30)

3. Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif Kualitatif karena bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang program PIPPK kelurahan Pasir Biru dan tidak membuktikan hipotesis tertentu, tapi hanya mendiskripsikan apa adanya mengenai suatu variabel, gejala atau keadaan. Menurut Sugiono (2007:209) metode deskriptif adalah sebuah rumusan masalah yang mengarahkan penelitian untuk menelusuri atau membidik keadaan sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, serta mendalam (sadiah, 2015: 4).

Menurut Rahmat (1985: 34-35) metode ini memiliki tujuan menggambarkan kenyataan atau sifat kelompok tertentu secara faktual, cermat serta sistematis. Ia tidak mengeksplor atau menjabarkan keterkaitan, tidak membuktikan hipotesis atau membuat dugaan. Dalam tahap pengumpulan datanya lebih menitikberatkan pada penelusuran lapangan dan kenyataan alamiah, dengan memahami gejala-gejala, menulis, membagi, dan sebisa mungkin tidak memberikan pengaruh, karena untuk memelihara keaslian gejala yang dipahami (Sadiah, 2015: 19).

Dengan demikian, pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif yang didukung oleh teori yang ada akan menjelaskan bagaimana masyarakat kelurahan Pasirbiru melaksanakan proram PIPPK di Kelurahan Pasirbiru. Peneliti

melaksanakan interaksi dan melakukan wawancara terhadap para informan untuk diketahui tanggapannya mengenai perencanaan, proses, pelaksanaan PIPPK. Adapun untuk mengetahui tanggapannya peneliti menggunakan paradigma *interpretative* dengan memahami secara mendalam. Sehingga data yang di peroleh berdasarkan opini masyarakat secara langsung.

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang diidentifikasi dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data mengenai proses program pemberdayaan masyarakat kota melalui PIPPK kelurahan Pasirbiru,
- b. Data mengenai perencanaan pemberdayan masyarakat kota melalui PIPPK kelurahan Pasirbiru, dan
- c. Data mengenai pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kota melalui PIPPK kelurahan Pasirbiru.

5. Sumber Data

a) Data Primer

Untuk mendapatkan data tentang keterlibatan masyarakat kelurahan Pasir Biru dalam prgram PIPPK didapatkan secara langsung dilapangan oleh peneliti yang bersumber dari pengurus RW, Karang Taruna, PKK, dan LPM setempat. dengan melalui observasi dan wawancara secara langsung dan mendalam dilokasi penelitian.

b) Data Sekunder

Data ini didapatkan dari berbagai sumber lain, yang berkenaan dengan yang penulis teliti, seperti pihak kelurahan Pasir Biru sebagai pelaksana PIPPK serta tokoh masyarakat setempat. Data ini dapat menyempurnakan pengamatan peneliti dalam menganalisa data ini yang akan diuraikan peneliti secara rinci sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti.

H. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Teknik ini yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung dilokasi penelitian. Dalam praktiknya peneliti mengamati bagaimana proses keterlibatan dalam proses program, perencanaan program dan pelaksanaan program. Dalam teknik observasi peneliti mendapatkan pengalaman berharga karena secara langsung berhadapan dengan masyarakat dan subjek penelitian lainnya.

b) Wawancara

Teknik wawancara sendiri merupakan proses komunikasi secara langsung antara peneliti dengan subjek penelitian itu sendiri. Dalam hal ini mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan serta menanyakan proses mengenai keterlibatan program, perencanaan dan pelaksanaan.

I. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data merupakan data yang sudah digabungkan dari hasil pengumpulan yaitu hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi serta literatur pustaka yang disusun dengan tepat (Sadiah, 2015: 91).

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa data yang dipakai yaitu jenis data kualitatif maka dari itu penulis menganalisis data melalui tahapan-tahapan berikut:

a. Reduksi Data

Setelah mengumpulkan data yang sudah diperoleh dari data primer yang sudah dijelaskan dan data sekunder, peneliti memilih data yang sesuai berdasarkan fokus penelitian yaitu dengan menyeleksi, menyederhanakan serta meringkas kemudian dikelompokkan. Dengan teknik tersebut akan mempermudah peneliti dalam melakukan program penelitiannya.

b. Kategorisasi Data

Data yang sudah difokuskan lalu di kategorisasikan dan disusun berdasarkan fokus yang harus diteliti. Dalam hal ini data yang dikategorisasikan adalah proses pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Langkah terakhir dari penelitian ini yaitu menyimpulkan dan membuktikan kebenaran hasil penelitian agar memudahkan dalam penguasaan data tersebut.